



KEMENTERIAN DALAM NEGERI

**RAPAT KOORDINASI PENYERAHAN JUKLAK DAN
RKAKL KEGIATAN TUGAS PEMBANTUAN LINGKUP
DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN.**

Disampaikan :

BUDIONO SUBAMBANG, ST, MPM

Direktur Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

The Media Hotel & Towers, 9 Februari 2018



DINAMIKA PERMASALAHAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN PERBATASAN ANTAR NEGARA

1. Lambannya Pertumbuhan Ekonomi dan Minimnya Pelayanan Sosial Dasar, berkenaan dengan akses.
2. Minimnya ketersediaan Energi di Kawasan Perbatasan Negara, Khususnya di daerah perbatasan RI-Malaysia.
3. Kondisi infrastruktur yang belum memadai, menyebabkan aktifitas peningkatan ekonomi menjadi terhambat (Konektivitas antar wilayah masih belum terintegrasikan).
4. Kesenjangan pembangunan infrastruktur dengan negara tetangga.
5. Kondisi geografis dan keterbatasan SDM.



KEDUDUKAN DAN IMPLEMENTASI TUGAS PEMBANTUAN DALAM UU 23/2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH

1. Klasifikasi Urusan Pemerintahan (Pasal 9)

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan, terdiri atas:

a. Urusan Pemerintahan Absolut, yaitu:

- ◆ Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

b. Urusan Pemerintahan Konkuren, yaitu:

- ◆ Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- ◆ Urusan Pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

c. Urusan Pemerintahan Umum, yaitu:

- ◆ Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.



KEDUDUKAN DAN IMPLEMENTASI TUGAS PEMBANTUAN DALAM UU 23/2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH

2. Untuk Urusan Pemerintah Pusat:

- a. Dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Pusat;
- b. Melimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di daerah berdasarkan Asas Dekonsentrasi; atau
- c. Menugasi daerah berdasarkan Asas Tugas Pembantuan;
- d. Penugasan kepada daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.



KEDUDUKAN DAN IMPLEMENTASI TUGAS PEMBANTUAN DALAM UU 23/2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH

3. Untuk Daerah Provinsi:

- a. Urusan Pemerintahan Provinsi dilaksanakan sendiri oleh daerah Provinsi;
- b. Menugasi daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Asas Tugas Pembantuan, atau;
- c. Menugasi Desa; (Kementerian PDT dan Ditjen Bina Pemdes, Kemendagri)
- d. Penugasan kepada daerah Kabupaten/Kota dan Desa ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.



KEDUDUKAN DAN IMPLEMENTASI TUGAS PEMBANTUAN DALAM UU 23/2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH

4. Bagi Daerah Kabupaten/Kota:

Penyelenggaraan Pemerintahan dimaksud:

- a. Dapat dilakukan sendiri oleh Daerah Kabupaten/Kota, atau dapat ditugaskan sebagian pelaksanaannya kepada Desa;
- b. Penugasan kepada Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota, atau;

Terbaginya Pembagian unsur penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dimaksud, dilandasi prinsip untuk mewujudkan akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional.



KEDUDUKAN DAN IMPLEMENTASI TUGAS PEMBANTUAN DALAM UU 23/2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH

5. Kriteria pembagian urusan:

- a. Lokasi pelaksanaan urusan pemerintahan;
- b. Pengguna/konsumen atas pelaksanaan urusan pemerintahan;
- c. Manfaat atau dampak pelaksanaan urusan pemerintahan;
- d. Kedudukan strategis bagi kepentingan nasional.



KEDUDUKAN DAN IMPLEMENTASI TUGAS PEMBANTUAN DALAM UU 23/2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH

6. Prinsip Pelaksanaan Tugas Pembantuan:

- a. Dilaksanakan oleh Daerah Otonom, bukan oleh Pemerintah Daerah, seperti selama ini;
- b. Anggaran pelaksanaan urusan dibiayai dari APBN dan wajib diinformasikan kepada DPRD, bersamaan dengan RAPBD oleh Kepala Daerah penerima Tugas Pembantuan;
- c. Status hasil Tugas Pembantuan diserahkan kepada daerah sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat, dan dapat ditarik kembali;
- d. Pertanggung jawaban, yaitu Kepala Daerah mempertanggungjawabkan kepada Pemerintah Pusat dan menyampaikan keterangan kepada DPRD, perangkat daerah tidak bertanggung jawab langsung ke pusat tapi bertanggung jawab kepada Kepala Daerah;
- e. Kekuasaan daerah, yaitu daerah dapat menetapkan Perda untuk mengatur penyesuaian pelaksanaan di daerah tersebut.



ARAH KEBIJAKAN DITJEN BINA ADWIL DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERBATASAN

VISI

**TERWUJUDNYA PEMBINAAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
DALAM MEMPERKUAT NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA**

MISI

**MEMFASILITASI PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DAERAH
DI KAWASAN KHUSUS DAN KAWASAN PERKOTAAN,
PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DAN MEWUJUDKAN
KEPASTIAN HUKUM BATAS WILAYAH NEGARA DAN
PENINGKATAN KERJASAMA SOSIAL, EKONOMI DAN BUDAYA
ANTAR NEGARA YANG BERBATASAN DENGAN NKRI**

SASARAN

**MENINGKATNYA KONSOLIDASI KEBIJAKAN DAN STANDARDISASI
TEKNIS BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN**

PROGRAM

PROGRAM BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

KEGIATAN

**PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN, PERKOTAAN DAN
BATAS NEGARA**

**N
A
W
A
C
I
T
A

K
E
T
I
G
A**



KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN ANTAR NEGARA SESUAI DENGAN UU 23 TAHUN 2014 PASAL 361

1. Kawasan perbatasan negara adalah kecamatan terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain;
2. Kewenangan Pemerintah Pusat di kawasan perbatasan meliputi seluruh kewenangan pengelolaan dan pemanfaatan sesuai dengan UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara;
3. Selain kewenangan tersebut di atas, Pemerintah Pusat juga mempunyai kewenangan antara lain Pembangunan Sarana Prasarana di Kawasan Perbatasan; (Penjelasan : Pasal 361 ayat 3 huruf c ; Pembangunan sarana prasarana kawasan antara lain jalan/jembatan, listrik, air minum, telekomunikasi, rumah sakit, pasar, pos lintas batas, transportasi, **pemerintahan**, sosial dan ekonomi).
4. Sesuai pasal 361 ayat 7, Pemerintah Pusat **WAJIB** membangun kawasan perbatasan agar tidak tertinggal dengan kemajuan kawasan perbatasan dengan negara tetangga.



CAPAIAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SARANA PRASARANA PEMERINTAHAN DI KAWASAN PERBATASAN ANTAR NEGARA DAN PULAU-PULAU TERLUAR T.A 2017

1. Pada tahun 2017, Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan telah mengalokasikan anggaran dalam rangka pembangunan Infrastruktur Sarana Prasarana Pemerintahan di Kawasan Perbatasan Negara dan Pulau-pulau Terluar, dengan sarpras yang sudah terbangun sebanyak 12 (dua belas) unit, dengan total pagu anggaran sebesar Rp 10,555,086,000 (sepuluh milyar lima ratus lima puluh lima juta delapan puluh enam ribu rupiah).

1. Adapun Sarana Prasarana yang dibangun berupa:
 - ◆ Kantor Kecamatan;
 - ◆ Kantor Desa;
 - ◆ Balai Pertemuan Umum; dan
 - ◆ Mess Aparatur.



REALISASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SARANA PRASARANA PEMERINTAHAN DI KAWASAN PERBATASAN ANTAR NEGARA DAN PULAU-PULAU TERLUAR T.A 2017

NO	KABUPATEN	NAMA BANGUNAN	JUMLAH UNIT	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN
1.	Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat	Pembangunan Balai Pertemuan Umum Kecamatan Badau	1 Unit	100%	95%
2.	Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat	Pembangunan Balai Pertemuan Umum Kecamatan Ketungau Tengah	1 Unit	100%	100%
3.	Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara	Pembangunan Balai Pertemuan Umum Kecamatan Lumbis Ogong	1 Unit	100%	85%
4.	Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara	Pembangunan Balai Pertemuan Umum Kecamatan Sei Menggaris	1 Unit	100%	90%
5.	Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau	Pembangunan Balai Pertemuan Umum di Kecamatan Teluk Sebong	1 Unit	100%	100%
6.	Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Aru	Pembangunan Balai Pertemuan Umum di Kecamatan Pulau Aru	1 Unit	100%	100%
7.	Kabupaten Morotai Provinsi Maluku Utara	Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Morotai Utara	1 Unit	100%	95%
8.	Kabupaten Rote Ndao Provinsi NTT	Pembangunan Kantor Desa Oibafok di Kecamatan Rote Barat Daya	1 Unit	100%	100%



REALISASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SARANA PRASARANA PEMERINTAHAN DI KAWASAN PERBATASAN ANTAR NEGARA DAN PULAU-PULAU TERLUAR T.A 2017

NO	KABUPATEN	NAMA BANGUNAN	JUMLAH UNIT	REALISASI FISIK	REALISASI KEUANGAN
9.	Kabupaten Timur Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembangunan Kantor Balai Pertemuan Umum Kecamatan Bikomi Utara	1 Unit	100%	85%
10.	Kabupaten Timur Tengah Utara Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembangunan Balai Pertemuan Umum di Kecamatan Miomaffo Barat	1 Unit	100%	95%
11.	Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembangunan Mess Aparatur di Kecamatan Amfoang Timur	1 Unit	100%	80%
12.	Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembangunan Balai Pertemuan Umum di Kecamatan Amfoang Timur	1 Unit	100%	80%
	JUMLAH		12 Unit	100 %	97,70 %



RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SARANA PRASARANA PEMERINTAHAN DI KAWASAN PERBATASAN ANTAR NEGARA DAN PULAU-PULAU TERLUAR T.A 2018

- ◆ Pada tahun 2018 Ditjen Bina Administrasi kewilayahan telah menyampaikan usulan kepada Bappenas untuk pembangunan Sarana Prasarana Pemerintahan sebesar Rp 82.000.000.000 (Delapan puluh dua milyar rupiah) untuk pembangunan 44 Unit Kantor Desa dan 25 Unit Kantor Kecamatan yang berada pada Lokpri tahun 2015, 2016 dan 2017.
- ◆ Dari hasil Trilateral meeting antara Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, telah dialokasikan dan ditetapkan Bappenas untuk wilayah Prioritas Nasional (PN) untuk pembangunan sarana prasarana di kawasan perbatasan sebanyak 5 Lokasi Kabupaten/Kecamatan, dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp 7.000.000.000 (Tujuh milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut;
- ◆ Sedangkan untuk prioritas K/L dialokasikan sebesar Rp 5.000.000.000.



REALISASI ALOKASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SARANA PRASARANA PEMERINTAHAN DI KAWASAN PERBATASAN ANTAR NEGARA DAN PULAU-PULAU TERLUAR T.A 2018

1. Atas hasil pembahasan program kerja dan anggaran T.A 2018, Direktorat Kawasan, Perkotaan dan Batas Negara, Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan mengalokasikan anggaran dalam rangka pembangunan Infrastruktur Sarana Prasarana Pemerintahan di Kawasan Perbatasan dan Pulau-pulau Terluar sebesar Rp12,000,000,000 (dua belas milyar rupiah) untuk pembangunan di 5 (lima) Kabupaten dengan status **Prioritas Nasional** dan 4 (empat) Kabupaten dengan status **Prioritas K/L**.
2. Jenis Tugas Pembantuan (TP) Sarana Prasarana yang dibangun berupa:
 - ◆ Kantor Kecamatan;
 - ◆ Kantor Desa;
 - ◆ Balai Pertemuan Umum; dan
 - ◆ Mess Aparatur.



ALOKASI ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN SARANA PRASARANA PEMERINTAHAN TAHUN 2018

Prov/Kab/kota	Satker	Sarpras yang di Bangun	Pagu Anggaran
A. PRIORITAS NASIONAL (PN)			
1. Kab Meranti	Setda Kabupaten	Pembangunan Kantor Kecamatan Rangsang Pesisir	Rp 1,7 M
2. Kab. Kepulauan Sangihe	Setda Kabupaten	Pembangunan Kantor Desa	Rp 1 M
3. Kab. Pulau Morotai	Setda Kabupaten	Pembangunan Kantor Kecamatan Morotai Utara Barat	Rp 1,4 M
4. Kab. Raja Ampat	Setda Kabupaten	Pembangunan Kantor Kecamatan Ayau Barat	Rp 1,5 M
5. Kab. Karimun	Setda Kabupaten	Pembangunan Kantor Kecamatan Meral Barat	Rp 1,4 M
		JUMLAH PAGU	RP 7 M



ALOKASI ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN SARANA PRASARANA PEMERINTAHAN TAHUN 2018

Prov/Kab/kota	Satker	Sarpras yang di Bangun	Pagu Anggaran
A. PRIORITAS K/L			
1. Kab Karimun	Setda Kabupaten	Pembangunan Kantor Kecamatan Ungar	Rp 1,5 M
2. Kab. Belu	Setda Kabupaten	Pembangunan Kantor Desa	Rp 800 JT
3. Kab. Talaud	Setda Kabupaten	Pembangunan Kantor Kecamatan	Rp 1,2 M
4. Kab. Sanggau	Setda Kabupaten	Pembangunan 2 Unit Kantor Desa	Rp 1,5 M
		Jumlah Total	Rp 5 M



RENCANA USULAN ALOKASI ANGGARAN TUGAS PEMBANTUAN SARANA PRASARANA PEMERINTAHAN TAHUN 2019

- ◆ Rencana alokasi dan lokasi yang disusun telah dan akan disinkronisasikan dengan rencana aksi Sekretariat Tetap BNPP Tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019.
- ◆ Pada tahun 2019 diharapkan seluruh Lokpri yang belum terbangun dapat terealisasi pada tahun anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Catatan :

Perhatian termasuk juga terhadap 42 (empat puluh dua) PPKT dari 111 (seratus sebelas) berpenduduk, sebagaimana Surat Sekretaris Kabinet Nomor B-473/seskab/wsk/9/2017, tanggal 8 September 2017. Hal : Pembangunan Kesejahteraan Rakyat 42 PPKT Berpenduduk -> di luar Lokpri Kecamatan Perbatasan).



RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA PEMERINTAHAN SESUAI DENGAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2019

Prov/Kab/kota	Satker	Jumlah Sarpras yang di Bangun	Pagu Anggaran
1. Kab. Karimun	Setda Kabupaten	4 Unit	Rp 3 M
2. Kab. Merauke	Setda Kabupaten	6 Unit	Rp 11 M
3. Kab. Rokan Hilir	Setda Kabupaten	5 Unit	Rp 25 M
4. Kab. Bengkalis	Setda Kabupaten	4 Unit	Rp 14 M
5. Kab. Meranti	Setda Kabupaten	1 Unit	Rp 2 M
6. Kota Dumai	Setda Kota	1 Unit	RP 2,4 M



RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA PEMERINTAHAN SESUAI DENGAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2019

Prov/Kab/kota	Satker	Jumlah Sarpras yang di Bangun	Pagu Anggaran
7. Kab Natuna	Setda Kabupaten	1 Unit	Rp 2,4 M
8. Kab. Mahakam Hulu	Setda Kabupaten	2 Unit	Rp 5 M
9. Kab. Sambas	Setda Kabupaten	1 Unit	Rp 2 M
10. Kab. Sintang	Setda Kabupaten	2 Unit	Rp 2,7 M
11. Kab. Bengkayang	Setda Kabupaten	3 Unit	Rp 4,5 M
12. Kab. Sanggau	Setda Kabupaten	3 Unit	Rp 2,520 M
13. Kepulauan Aru	Setda Kabupaten	4 Unit	RP 10 M



RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA PEMERINTAHAN SESUAI DENGAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2019

Prov/Kab/kota	Satker	Jumlah Sarpras yang di Bangun	Pagu Anggaran
14. Kab Alor	Setda Kabupaten	3 Unit	Rp 4,1 M
15. Kab. Rotte Ndao	Setda Kabupaten	9 Unit	Rp 20,600 M
16. Kab. Morotai	Setda Kabupaten	3 Unit	Rp 2,220 M
17. Kab. Maluku Barat Daya	Setda Kabupaten	4 Unit	Rp 4,8 M
18. Kab. Maluku Tenggara Barat	Setda Kabupaten	3 Unit	Rp 5,4 M
19. Kab. Pegunungan Bintang	Setda Kabupaten	2 Unit	RP 18 M



RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN DALAM RANGKA PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA PEMERINTAHAN SESUAI DENGAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2019

Prov/Kab/kota	Satker	Jumlah Sarpras yang di Bangun	Pagu Anggaran
20. Kab Keerom	Setda Kabupaten	3 Unit	Rp 16,550 M
21. Raja Ampat	Setda Kabupaten	3 Unit	Rp 8 M
22. Kab. Timor Tengah Utara	Setda Kabupaten	3 Unit	Rp 8 M
23. Kab. Nunukan	Setda Kabupaten	18 Unit	Rp 51,420 M
24. Kab. Malinau	Setda Kabupaten	3 Unit	Rp 9 M
25. Kepulauan Sangihe	Setda Kabupaten	2 Unit	RP 4 M
	Jumlah Total	93 Unit	Rp 238,5 M



DATA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SARANA PRASARANA PEMERINTAHAN DI KAWASAN PERBATASAN ANTAR NEGARA DAN PULAU-PULAU TERLUAR T.A 2016 - 2019

Tahun Anggaran	Jumlah Unit	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1. Tahun 2016	16 Unit	Rp. 15.961.312.000	Rp. 14.373.000.493	90,5
2. Tahun 2017	12 Unit	Rp. 10.555.086.000	Rp 10.312.293.473	97,70
3. Tahun 2018	10 Unit	Rp. 12.000.000.000	ON PROGRESS	-
4. Tahun 2019	93 Unit	Rp. 238.000.000.000	-	-



DATA DOKUMENTASI INFRASTRUKTUR SARANA PRASARANA PEMERINTAHAN DI KAWASAN PERBATASAN ANTAR NEGARA DAN PULAU-PULAU TERLUAR T.A 2017





**DATA DOKUMENTASI INFRASTRUKTUR SARANA PRASARANA
PEMERINTAHAN DI KAWASAN PERBATASAN ANTAR NEGARA DAN
PULAU-PULAU TERLUAR
T.A 2017**



**Kantor Kelurahan Sedanau
Kabupaten Natuna**



Kantor BPP Jayapura



**Kantor Kec. Lakmaen Selatan
Kabupaten Belu**



**Guest House Temajuk
Kabupaten Sambas**



***SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH***